



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 18 Januari 2021

Halaman: 2

DAPAT DUKUNGAN APBD DAN APBN

Penataan Kawasan Kumuh Kembali Dilanjutkan

YOGYA (KR) - Program penataan kawasan kumuh pada tahun ini kembali dilanjutkan. Akan tetapi target capaiannya belum bisa diselesaikan dengan desain awal seiring kondisi pandemi. Meski demikian program tersebut tetap didukung melalui APBD dan APBN.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Sigit Setiawan, menjelaskan semua usulan yang disampaikan saat pembahasan rancangan APBD 2021 akhirnya disetujui. "Tahun 2021 kita lanjutkan tapi baru sebagian dan belum bisa tuntas," jelasnya, Minggu (17/1).

Mayoritas kawasan kumuh yang akan ditata berada di kawasan pinggir sungai. Dukungan APBD Kota Yogyakarta mencapai empat paket di tiga kelurahan. Masing-masing di Warungboto, Gunungketur, RW 01 Klitren, dan RW 03 Klitren. Sedangkan yang dibiayai dari APBN menyasar tiga wilayah yakni Gowongan, RW 01 Terban, dan Surokarsan Wirogunan. Total dana dari pusat itu mencapai Rp 18 miliar berupa peningkatan kualitas permukiman Kali Code.

Sigit menambahkan, penyesuaian volume kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Dicontohkannya untuk penataan kawasan kumuh di Warungboto desain awal membutuhkan dana Rp 4 miliar, namun tahun ini baru bisa dipenuhi Rp 1,8 miliar.

"Begitu juga yang di Klitren itu targetnya sampai RW 05 tetapi memang harus bertahap," imbuhnya.

Bentuk atau teknis penataan kawasan kumuh di tiap wilayah juga berbeda. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kekumuhan serta kebutuhan wilayah. Seperti di Gunungketur lebih ke peningkatan kualitas jalan lingkungan serta RW 01 Klitren berupa penataan sanitasi dengan membangun bangunan IPAL.

Sementara dari sisi kuantitas kawasan kumuh yang akan ditata sepanjang tahun ini mencapai 10,63 hektare. Sedangkan hingga akhir tahun 2020, total kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tersisa 70,87 hektare. "Di beberapa lokasi yang menjadi target memang ada RT atau RW yang sebenarnya sudah memenuhi skor sebagai kawasan tidak kumuh tetapi masih masuk dalam bagian penanganan untuk menuntaskan penataan, terutama masalah sanitasi," urai Sigit.

Pada tahun 2020 lalu, penataan kawasan kumuh hanya dilakukan di bantaran Kali Winongo wilayah Pakuncen, Pringgokusuman, dan Tegalsrejo. Program itu pun dibiayai dari hibah World Bank dengan alokasi anggaran Rp 14 miliar. (Dhi)-t

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...



KR-Ardhi Wahdan
Kepala

Warga menyusuri bantaran Kali Code melalui jalan inspeksi hasil penataan kawasan kumuh.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005